

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Bentuk Keungan Sosial Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Keuangan sosial syariah merupakan bagian dari keuangan syariah yang alokasi dananya yang berasal dari masyarakat digunakan untuk kepentingan sosial-lingkungan dan dalam menjalankan skemanya tetap berdasarkan prinsip dan hukum syariah . Keuangan sosial Islam dapat bersumber dari alokasi dana zakat, infak, sadaqah, dan wakaf (ZISWAF) yang dikeluarkan masyarakat untuk kepentingan sosial umat sebagaimana diperintahkan dalam Islam. Perintah (ZISWAF) dalam Islam mempunyai manfaat untuk menyamakan ketimpangan pendapatan antara si kaya dan si miskin Masyarakat yang berpendapatan tinggi dapat membantu masyarakat berpendapatan rendah melalui penyaluran dan pendayagunaan dana ZISWAF sehingga kemiskinan dapat dikurangi. Dana ZIS juga dapat digunakan untuk sektor produktif sehingga masyarakat miskin dapat

memanfaatkannya untuk membangun usaha sehingga pendapatannya dapat meningkat.¹

Keuangan sosial Islam mencakup berbagai instrumen, termasuk zakat, sedekah, wakaf, dan keuangan mikro Islam. Zakat dan sadaqah merupakan instrumen sosial integral dalam Islam yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Zakat, salah satu rukun Islam, berfungsi sebagai sarana mendistribusikan kembali kekayaan dari masyarakat kaya kepada masyarakat yang kurang beruntung. Ini adalah sumbangan amal wajib bagi umat Islam yang memenuhi kriteria tertentu, Zakat mempunyai arti penting dalam sistem sosial-ekonomi Islam dan diakui sebagai alat keuangan untuk memerangi kemiskinan.²

Untuk memperluas dampak zakat, banyak negara Islam telah mengintegrasikan aspek keuangan sosial tambahan, seperti wakaf, keuangan mikro/kredit mikro Islam, dan sukuk, ke dalam sistem zakat. Zakat memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang adil dengan mengentaskan kemiskinan dan kelaparan, menjamin pendidikan yang berkualitas dan

¹ M. Kabir Hassan and others, 'Revitalizing the Role of Islamic Social Finance in Achieving the SDGs: A Comprehensive Review', *Al Qasimia University Journal of Islamic Economics*, 3.2 (2023), 1–24.

² Mohd Yahya Mohd Hussin and others, 'Islamic Social Finance as Alternative Mechanism for Well-Being of the Community: A Bibliometric Analysis', *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, 22.2 (2024), 6509–33.

baik. Sumber integral lain dari keuangan sosial Islam adalah wakaf (dana abadi), sebuah instrumen serbaguna yang digunakan untuk berbagai tujuan keagamaan dan sosial-ekonomi, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dalam komunitas Muslim. Dalam konteks yang lebih luas, wakaf mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Sumber lain dari keuangan sosial Islam adalah sedekah, yang merupakan sumbangan sewenang-wenang hanya kepada orang yang membutuhkan atau orang yang tertindas saja. zakat merupakan rukun islam yang wajib. Selain sadekah, qard al-hasan juga merupakan sumber keuangan sosial Islam, mengacu pada pinjaman tanpa bunga yang diberikan oleh masyarakat mampu kepada masyarakat kurang mampu, dengan jangka waktu pembayaran fleksibel yang ditentukan oleh kemampuan keuangan peminjam.³

Dalam konsep dasar zakat dan pengentasan kemiskinan, Islam mengatur praktik redistribusi pendapatan. untuk memberantas riba dan menghilangkan kesulitan masyarakat Muslim di tingkat mikro dan makro melalui perannya di sektor negara. Tujuan wakaf mungkin untuk masyarakat pada besar, termasuk penyediaan layanan keagamaan, bantuan sosial-ekonomi kepada yang

³ Azwar Iskandar and others, 'Islamic Philanthropy and Poverty Reduction in Indonesia: The Role of Integrated Islamic Social and Commercial Finance Institutions', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 16.2 (2021), 274–301.

membutuhkan segmen, masyarakat miskin, pendidikan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, dan tujuan lainnya. Banyak Para ulama mengistilahkan kepemilikan harta/harta wakaf “seolah-olah milik Tuhan”. Pendiri (wakaf) menentukan tujuan harta benda tersebut diwakafkan dapat digunakan dan bagaimana hasil, jasa dan pendapatannya dapat didistribusikan. Itu pendiri juga menentukan pengelolaan wakaf dan proses suksesi pengurus. Pendiri dapat menerapkan batasan atau kualifikasi apa pun yang disukainya atas wakafnya, dll. Kebanyakan wakaf bersifat abadi dan sering kali hal ini ditekankan dalam akta wakaf.⁴

Cara mengatasi kemiskinan bisa dengan berbagai langkah dan strategi. Hal yang harus dilakukan sejak awal untuk mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat kita adalah dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang yang mempunyai (aghniya’) terhadap kaum fakir, miskin, dhu’afa’ dan mustadh’afin. Salah satu bentuk kepedulian aghniya’ adalah kesediaannya untuk membayar zakat dan mengeluarkan sedekah. Zakat merupakan infak atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedang sedekah

⁴ Habib Ahmed, ‘Waqf -Based Microfinance: Realizing The Social Role of Islamic Finance “Integrating Awqaf in the Islamic Financial Sector”’, *Integrating Awqaf in the Islamic Financial Sector*, 2021, 1–22.

adalah sunnah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Hal ini berimplikasi pada keberlangsungan zakat yang lambat laun berubah menjadi semacam aktifitas kesementaraan, yang dipungut dalam waktu bersamaan dengan zakat fitrah. Akibatnya, pendayagunaan zakat hanya mengambil bentuk konsumtif yang bersifat peringanan beban sesaat yang diberikan setahun sekali, dan tidak ada upaya untuk membebaskan mereka agar menjadi mandiri. Sehingga beban kehidupan orang-orang fakir dan miskin hanya akan hilang untuk sementara waktu saja dan selanjutnya akan kembali menjadi fakir dan miskin lagi. Oleh karena itu, zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat. Sebab, salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme adalah penguasaan dan kepemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi, sehingga hal ini berimplikasi pada pengabaian mereka terhadap orang yang kurang mampu serta beruntung secara ekonomi.

Dengan demikian, zakat disalurkan akan mampu meningkatkan produksi, hal ini dilakukan untuk memenuhi tingginya permintaan terhadap barang. Dalam rangka mengoptimalkan pengaruh zakat, maka harusnya

digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan parsial dan pendekatan struktural.⁵

Indikator bentuk Keuangan Sosial Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan.

- a. Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Ekonomi:
Mengukur sejauh mana instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin serta kualitas hidup mereka, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pangan.
- b. Aksesibilitas dan Partisipasi dalam Pembiayaan:
Menilai sejauh mana masyarakat miskin dapat mengakses sumber pembiayaan syariah secara adil, serta tingkat keterlibatan mereka dalam kegiatan ekonomi produktif yang didukung oleh dana sosial Islam.
- c. Keberlanjutan dan Kemandirian Ekonomi:
Mengukur keberhasilan program keuangan sosial Islam dalam menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang bagi penerima manfaat, serta kemampuan usaha yang dibangun untuk bertahan dan berkembang tanpa ketergantungan terus-menerus pada bantuan eksternal.

⁵ Ahmad Atabik, 'Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2.2 (2021), 339–61.

2. Upaya Keuangan Sosial Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan

Wakaf, Infak, sedekah sebagai pilar perekonomian Indonesia mengusung dua konsep ekonomi, yakni berbagi sebagai untuk menyuburkan perekonomian yang berkeadilan, juga membantu fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Dan selanjutnya sebagai penguatan kekuatan ekonomi agar meningkat. ZISWAF menjadi solusi atas kemiskinan, dengan melakukan perkembangan dalam pengelolaan dana yang dikumpulkan oleh ZISWAF dan pengelolaan dana secara produktif.

Dalam konteks Islam, praktik-praktik ini mendorong solidaritas sosial dan saling peduli antar individu dan komunitas. Dengan memberikan harta dan sumber daya kepada yang membutuhkan melalui wakaf, infak, dan sedekah, umat Islam dapat berperan aktif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Identifikasi hambatan yang dihadapi dalam pengentasan kemiskinan melalui wakaf, infak, dan sedekah.⁶

Zakat, infaq dan sedekah (ZIS) merupakan salah satu aliranamaliah dalam Islam yang bertujuan untuk

⁶ Ella Lailatul Machmudah, 'Pengembangan Wakaf, Infak, Dan Sedekah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus Masyarakat Muslim Surabaya', 17.1 (2024), 11–22.

mengatasi ketidakmampuan. Islam bertujuan untuk mencapai keadilan sosial melalui distribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, sebagai aturan, Islam mengakui bahwa dalam milik orang kaya, ada hak-hak mereka yang membutuhkan. Zakat adalah sarana penting perpajakan Islam Inti dari alat Zakat adalah menyediakan jaminan sosial dan kebutuhan dasar bagi orang miskin Apalagi tujuan keberadaan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Adapun zakat mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah untuk membersihkan harta, benda dan jiwa manusia supaya selalu dalam keadaan fitrah atau suci. Yang kedua, zakat berfungsi sebagai dana dari masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan atau masyarakat yang taraf kehidupannya dibawah rata-rata. Umumnya zakat yang diberikan oleh muzakki bersifat konsumtif yaitu hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menutupi kebutuhan makanan dan sandang. Namun jika dipikir lebih panjang lagi hal ini kurang dapat membantu untuk jangka panjang. Karena zakat yang diberikan itu akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dimana akan habis, setelah itu mustahik akan kembali lagi hidup dalam keadaan fakir.⁷

⁷ Ahmad Suwandi and Yenni Samri, 'Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah) Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan. Secara etimologi zakat berarti suci, baik, tumbuh, bersih dan berkembang, dan secara terminologi zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah diambil dari harta orang-orang tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Esensi dari zakat adalah pengelolaan dana untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam.⁸

Zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat. Sebab, salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme adalah penguasaan dan kepemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi, sehingga hal ini berimplikasi pada pengabaian mereka terhadap orang yang kurang mampu serta beruntung secara ekonomi. Dengan demikian, zakat disalurkan akan mampu meningkatkan produksi, hal ini dilakukan untuk memenuhi tingginya permintaan terhadap barang. Apabila

Masyarakat Kota Medan’, *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3.2 (2022), 15–30.

⁸ Alfin Aziz, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto, ‘Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan’, *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 19.1 (2022), 1–46.

seluruh orang kaya diberbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan meratas niscaya kemiskinan akan menjadi sirna.⁹

Indikator Upaya Keuangan Sosial Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan.

- a. Akses dan Penyediaan Layanan Keuangan :Jumlah penerima manfaat zakat, infak, sedekah, dan pembiayaan syariah.
- b. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi: Peningkatan pendapatan penerima manfaat dan jumlah usaha kecil yang berkembang.
- c. Keberlanjutan dan Skalabilitas: Keberlanjutan sumber dana zakat, infak, dan wakaf, serta kemampuan program untuk berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat miskin.

3. Kendala Yang Di Hadapi Dalam Pengoptimalisasi Keuangan Sosial Islam Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

Salah satu kendala utama dalam optimalisasi keuangan sosial Islam adalah kurangnya kerangka regulasi yang harmonis dan jelas. Banyak lembaga zakat, wakaf, dan keuangan mikro syariah beroperasi di bawah pengawasan yang tidak konsisten, sehingga menimbulkan

⁹ Atabik.

masalah transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Penelitian dari Universiti Sains Islam Malaysia menyoroiti bahwa tantangan ini perlu diatasi melalui harmonisasi standar regulasi, peningkatan mekanisme audit dan pelaporan, serta integrasi lintas negara untuk mendorong distribusi dana sosial secara lebih efisien dan adil.¹⁰

Optimalisasi adalah sebuah proses yang dilakukan agar dapat mencapai suatu hasil yang efektif dan ideal sehingga mencapai target yang diinginkan. Untuk mencapai zakat yang optimal maka dalam pengoptimalisasian zakat agar terkelola secara sistematis dan terstruktur yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya maka diperlukan suatu lembaga yang menjadi penghubung yang dapat menjadi mediator antara si penerima manfaat zakat dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat ada tiga Indikator optimalisasi dalam pengelolaan zakat yaitu : 1. Pendistribusian 2. Pemerataan, keadilan dan kewilayahan 3. pendayagunaan/kemanfaatan.¹¹

¹⁰ Hany Meridha Isnaeni, Vety Vera, and Andi Harpepen, 'Penguatan Keuangan Sosial Syariah Dalam Mengatasi Kemiskinan Dan Krisis Kemanusiaan Di Kota Bengkulu', *MESTAKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.6 (2024), 717–22.

¹¹ Fitri Ana Siregar and Angger Hidayat, 'Optimalisasi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia', *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.1 (2024), 24–34.

Problematika pengelolaan zakat diantaranya; keterbatasan skill dan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam pengelolaan zakat dan masih lemahnya peraturan-peraturan yang dapat meningkatkan pengoptimalan pengelolaan zakat. Sebagai solusi atas problematik tersebut adalah mensegerakan solusi-solusi terhadap problem-problem yang terjadi pada organisasi pengelola zakat (OPZ), keterlibatan stakeholder (pemerintah) dalam mengatur mekanisme pengelolaan zakat dan menggalakkan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban dan potensi zakat sebagai instrumen ekonomi dan kesejahteraan. Untuk mengoptimalkan peran zakat sebagai modal sosial yang dapat mengentaskan kemiskinan, maka lembaga amil zakat perlu melakukan langkah strategis, yaitu penerapan *good corporate governance* pada lembaga amil zakat, menerapkan digitalisasi sistem pengelolaan lembaga amil zakat dan melakukan sinergi kolaborasi dan kerjasama dengan lembaga lain yang sesuai dengan visi dan misi lembaga amil zakat. Program ini akan mendorong kesadaran kepercayaan masyarakat pada lembaga amil zakat. Strategi yang dilakukan juga akan mendorong kemudahan dalam pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat sehingga dapat meningkatkan muzakki sekaligus meningkatnya dana zakat yang selanjutnya

dapat didistribusikan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel.¹²

Lembaga keuangan syariah harus membuat strategi yang matang untuk menghadapi berbagai masalah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, karena dukungan pemerintah yang terbatas, industri keuangan syariah masih belum berkembang dengan baik. Secara keseluruhan, kondisi pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari luar, terutama perlambatan ekonomi negara. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah harus melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat struktur manajemen mereka. Kinerja sektor keuangan syariah secara keseluruhan akan sangat dipengaruhi oleh proses konsolidasi ini. Dana sosial dalam Islam memiliki peran penting dalam menunjang perencanaan keuangan masyarakat, terutama bagi kelompok miskin dan rentan. Pemanfaatan zakat dan sedekah dapat dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan, sehingga pendapatan utama masyarakat tidak terkuras untuk hal-hal mendasar. Dengan demikian, mereka memiliki kesempatan untuk

¹² Dzikrulloh Dzikrulloh and Arif Rachman Eka Permata, 'Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia', *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 6.2 (2020), 46–58.

mulai menabung atau melakukan investasi dalam skala kecil. Zakat dan wakaf produktif dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan usaha mikro yang bebas dari unsur riba, sehingga masyarakat lapisan bawah yang tidak memiliki akses ke lembaga perbankan tetap dapat menjalankan kegiatan usaha yang menghasilkan. Hal ini turut mendukung perencanaan keuangan masyarakat melalui tambahan pendapatan yang lebih stabil. Sementara itu, pemanfaatan wakaf dalam bentuk penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan memberikan manfaat jangka panjang yang dapat menekan biaya hidup dan meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga, sehingga secara tidak langsung memperkuat strategi keuangan rumah tangga.¹³

4. Badan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan disingkat BP Taskin adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu. Berdiri pada 2024 melalui Peraturan Presiden No. 163 Tahun 2024, BP Taskin merupakan pengembangan dari tim koordinasi antar kementerian/lembaga yang dibentuk setiap

¹³ Puput Dwi Wulandari and others, 'Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia', *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1.5 (2025), 31–38.

periode Presiden untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan percepatan pengentasan kemiskinan secara sinergis dan terpadu. Sejak 23 Oktober 2024, badan dikepalai oleh Budiman Sudjatmiko.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 163 Tahun 2024 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 November 2024, BP Taskin memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

Tugas : BP Taskin mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu.

Fungsi :

1. penyusunan rencana induk dan program percepatan pengentasan kemiskinan;
2. penyelarasan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di kementerian/lembaga;
3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di kementerian/ lembaga;
4. pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di kementerian/ lembaga;
5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan percepatan pengentasan kemiskinan;
6. pelaksanaan administrasi Badan; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden.¹⁴

Strategi jangka pendek dalam pengentasan kemiskinan adalah melanjutkan berbagai program pemerintah yang sudah berjalan terkait penurunan beban pengeluaran masyarakat antara lain melalui program bantuan sosial seperti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan (Program Beras Sejahtera/Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIP-K). Selain itu, terdapat beberapa program yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan akses lapangan kerja, program padat karya tunai (*cash for work*), serta peningkatan kompetensi pekerja melalui pelatihan. Program-program ini perlu terus ditingkatkan dari sisi kualitas program, pemerataan cakupan penerima manfaat, dan keterlibatan berbagai pihak terkait. Sinergi antarinstansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), serta swasta harus

¹⁴ Wikipedia” badan percepat pengentasan kemiskinan” 19 mei 2025.< d.wikipedia.org/wiki/Badan_Percepatan_Pengentasan_Kemiskinan>{ 21 maret 2025}

makin masif sehingga keberlanjutan berbagai program yang sudah berjalan dapat lebih efektif.¹⁵

B. Kerangka Konseptual



¹⁵ Kementerian keuangan RI” Pengentasan dari Kemiskinan: Strategi dan Peran KPPN selaku Treasurer dan Financial Advisor” 19 mei 2025 < <https://djpb.kemenkeu.go.id/>> {21 juni 2024}

X1 (Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat) →
X2 (Dampak Terhadap Infaq dan Shadaqah)
Pemberdayaan ekonomi melalui zakat juga dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk berinfaq dan bersedekah. Jika masyarakat merasa zakat mereka memberikan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan, mereka cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam program infaq dan sedekah. Ini menciptakan siklus positif di mana zakat, infaq, dan sedekah saling mendukung dalam mengurangi kemiskinan.

X2 (Dampak Terhadap Infaq dan Shadaqah) → Y
(Tingkat Pengurangan Kemiskinan)
Infaq dan sedekah juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Dana infaq dan sedekah yang disalurkan dapat membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Dampak langsungnya adalah peningkatan kualitas hidup yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Ekonomi Melalui Zakat) → Y (Tingkat
Pengurangan Kemiskinan)
Pemberdayaan ekonomi melalui zakat dapat langsung mempengaruhi pengurangan kemiskinan. Zakat yang disalurkan kepada masyarakat miskin berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan

mereka, baik dalam bentuk bantuan langsung atau modal usaha. Dengan adanya zakat, penerima manfaat dapat memperbaiki kondisi ekonomi mereka, yang pada akhirnya mengurangi jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Kedua variabel X_1 (zakat) dan X_2 (infaq dan sedekah) berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan (Y) melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Keduanya saling terkait dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif.

